

PEREMPUAN DALAM DISKRIMINASI ETNIS DI INDONESIA

(ANALISIS FILM SAPU TANGAN FANG YIN)

Prinisia Nurul Ikasari

Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang

E-mail: prinisia.nurul@untidar.ac.id

Abstract: *Ethnic Chinese are ethnic minorities in Indonesia since independence became a frightening thing for the Indonesian nation. This study aims to explain discrimination against ethnic Chinese in Indonesia through analysis in Sapu Tangan Fang Yin Movie. This research uses a qualitative approach through semiotic analysis Roland Barthes. The results of this study indicate the existence of symbolic violence in Sapu Tangan Fang Yin Movie, discrimination arises in the form of swearing, metaphor, and visual became a real discriminatory tool in the ethnic Chinese existence.*

Keywords: *gender, discrimination, symbolic violence, Tionghoa, ethnicity*

Abstrak: *Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas di Indonesia yang semenjak kemerdekaan menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia. Stereotip muncul dengan menghasilkan produk diskriminasi terhadap etnis ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia melalui analisis pada film Sapu Tangan Fang Yin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis semiotika Ronald Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan simbolik dalam film Sapu Tangan Fang Yin muncul dalam bentuk umpatan, kata kiasan, maupun bentuk visual menjadi alat diskriminasi yang nyata pada keberadaan etnis Tionghoa.*

Kata kunci: *jender, diskriminasi, kekerasan simbolik, Tionghoa, etnisitas*

Pendahuluan

Apa yang terlintas ketika kata “China” muncul dibenak orang Indonesia, tentu saja saja segala bentuk stereotipe muncul dan menghiasi benak orang Indonesia. Mulai dari stereotip positif dan negatif akan saling beradu. Orang China atau kini akrab dengan nama Tionghoa di Indonesia merupakan bagian etnis yang diakui dalam Undang – Undang. Orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Diakuinya etnis ini sebagai bagian dari Indonesia tidaklah datang dengan begitu saja. Golongan minoritas ini pun harus mengalami banyak peristiwa kelam hingga akhirnya diakui sebagai bagian dari Indonesia. Berawal dari ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Tujuan utama saat itu adalah Asia Tenggara. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya ada pedagang yang memutuskan untuk menetap dan menikahi perempuan

setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus berdagang.

Sebagian besar dari orang-orang Tionghoa di Indonesia menetap di pulau Jawa. Daerah-daerah lain di mana mereka juga menetap dalam jumlah besar selain di daerah perkotaan adalah seperti wilayah Sumatera Utara, Bangka-Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Kalimantan Barat, Banjarmasin dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Di pulau Jawa tepatnya di Tangerang, Banten, masyarakat Tionghoa telah menyatu dengan penduduk setempat dan mengalami pembauran lewat perkawinan, sehingga warna kulit mereka kadang-kadang lebih gelap dari Tionghoa yang lain, dan istilah buat mereka disebut Cina Benteng. Perkembangan percampuran budaya dan perkawinan ini menjadikan orang Tionghoa menyatu dengan bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa pergerakan kemerdekaan Indonesia orang Tionghoa keturunan pun ikut bergabung seperti melalui pengembangan pendidikan.

Pada perkembangan selanjutnya adanya bentuk diskriminasi atas etnis Tionghoa pada dasarnya diawali oleh pemerintah kolonial Belanda yang memisahkan orang Tionghoa ke dalam

kategori nonpribumi berdasarkan prinsip rasialis (Suryadinata, 2010: 227). Pemerintah Belanda membagi kependudukan di Indonesia dalam tiga kelompok yakni, kelompok Warga Negara Belanda, kelompok Pribumi, kemudian Peranakan dan Totok Tionghoa berada pada kelompok yang dinamakan 'Timur Asing' atau 'Eastern Orientals' (Greif; 1991 : xi). Adanya proses rasialisasi tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan orang Pribumi, sebab jika mereka bersatu mereka akan memiliki kekuatan untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Ini menurut Suryadinata adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mempertahankan keterpisahan masyarakat Tionghoa dan penduduk Pribumi yang disebut '*Divide and Rule*'. (Suryadinata, 2002: 8).

Usaha ini dimaksudkan penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan orang Pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Dengan begitu hal ini secara tidak langsung berperan pada persoalan perpisahan orang Tionghoa di Indonesia. Stereotipe ini muncul diligitimasi oleh Negara seperti dimasa orde lama saat tragedi 30 September 1965 (dikenal G30S/PKI) Soekarno mencurigai PKI maka secara tidak langsung Tiongkok sebagai Negara terbesar komunis ikut terkena imbas yang melebar pada

keturunan Tionghoa di Indonesia. Akibatnya, pemerintah merasa terancam oleh keadaan tersebut di atas karena mereka mengira bahwa keturunan Tionghoa masih bagian dari Cina Komunis (Suryadinata, 2002: 45-47).

Kemudian di masa orde baru legitimasi atas stereotipe ini pun muncul pada Instruksi Presiden No.14 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina. Undang-Undang ini melarang mengamalkan perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, dan adat istiadat yang sama, di depan umum. Selain ini, undang ini, walaupun tidak langsung, menolak agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia. Sehingga di Jakarta, tahun 1967 koran-koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah. Ditambah lagi ditahun 1998 sebelum reformasi berlangsung diskriminasi itu ada dengan Surat edaran SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan yang menggunakan bahasa Mandarin di depan umum (Tempo, 17 August 2004 : 36 – 37).

Adanya legitimasi oleh Negara juga di ikuti dengan stereotipe media melalui konstruksi sosial media. Banyaknya pemberitaan yang tidak berimbang menambah panjang stereotip negatif bagi etnis ini. Praktik ini berlangsung dalam waktu yang lama sehingga secara sadar atau

tidak, media di Indonesia telah terbiasa melaksanakan kemauan politik penguasa. Salah satunya adalah perlakuan diskriminatif terhadap golongan Tionghoa melalui berbagai produk komunikasi yang disajikan media massa.

Puncaknya adalah ketika reformasi di tahun 1998 di bulan Mei di mana pergerakan mahasiswa yang menginginkan pemerintahan orde baru mundur justru berdampak pada tragedi kerusuhan yang menyasar kepada warga Tionghoa di Indonesia. Yakni di Jakarta, pada tanggal 13-14 Mei 1998, seperti di paparkan Purdey (2006) Kemarahan massa akibat penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang dikembangkan oleh kelompok politik tertentu jadi kerusuhan anti Cina. Peristiwa ini merupakan peristiwa anti Cina paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sejumlah perempuan keturunan Tionghoa diperkosa.

Inilah yang coba diangkat dalam film *Sapu Tangan Fang Yin*, di mana diskriminasi yang terjadi kepada etnis Tionghoa di Indonesia berdampak buruk bagi warga Tionghoa di Indonesia yang puncaknya di tragedi kerusuhan 1998 dan etnis ini terutama perempuan Tionghoa menjadi korban yang menimbulkan traumatik tersendiri bagi etnis ini di Indonesia.

Adalah penting dan menarik mengangkat isu minoritas etnis ini karena

sesungguhnya pada kenyataannya kebangkitan etnis Tionghoa yang mulai dirasakan saat reformasi 1998 yang juga menjadi batu awal bangkitnya pers di Indonesia nyatanya etnis ini hingga kini pun masih mengalami diskriminasi.

Padahal jika kita menilik era pasca reformasi banyak peraturan yang mencoba mengangkat isu ini sebagai bahan kajian hak asasi manusia dengan berhasil dibentuknya komnas perempuan, kemudian di tanggal 17 Januari 2000 Presiden K.H. Abdurrachman Wahid atau Gusdur juga mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Inpres Gusdur telah membuka kungkungan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.

Data-data menunjukkan, Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas di Indonesia yang semenjak kemerdekaan menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia. Stereotip muncul dengan menghasilkan produk diskriminasi terhadap etnis ini. Puncaknya di Jakarta di mana aksi mahasiswa pada penurunan orde baru beralih kepada kemarahan massa yang dikembangkan oleh kelompok politik tertentu jadi kerusuhan anti Cina. Peristiwa ini merupakan peristiwa anti Cina paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia, di mana sejumlah perempuan keturunan

Tionghoa diperkosa. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa terjadi di Indonesia, salah satunya melalui analisis film Sapu Tangan Fang Yin. Film yang dianggap sebagai representasi kejadian kelam di era kerusuhan anti Cina.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis semiotika. Analisis semiotika dipilih sebagai analisis karena komponen utama dalam penelitian ini merupakan teks media. Teknik analisis semiotika pada penelitian ini berkiblat pada model semiotika Roland Barthes yang menekankan pada cara pembentukan tanda yang menentukan makna dengan menekankan interaksi antara teks dan pengalaman personal atau penggunaannya. Sehingga dalam proses pemaknaan sebuah tanda memiliki 2 tahap,

yakni tahap pertama (makna denotasi) di mana tanda akan diinterpretasikan sesuai tanda awal atau dengan melihat realitas fungsi asalnya, kemudian di tahap kedua yakni konotasi (operasi ideologi atau yang disebut dengan mitos) di mana tanda yang muncul tadi akan dihubungkan oleh realitas budaya, gender, agama, ideologi, yang menyertainya. Sehingga nanti pada tahap selanjutnya akan muncul makna yang dipengaruhi oleh prespektif yang memaknainya tadi. Untuk memudahkan proses analisa dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan unit analisis yaitu meliputi mengidentifikasi makna yang terkandung dalam film Sapu Tangan Fang Yin yang memiliki unsur konkret yang sesuai dengan objek penelitian. Pada tahapan berikutnya dilakukan pemilahan *scene* atau adegan yang dinilai mengandung unsur semiotik pada diskriminasi maupun kekerasan simbolik.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Denotasi I:

Waktu: 06:19-06:40



Pada adegan ini menggambarkan sekumpulan orang (massa) menaiki kendaraan truk berwarna merah, dilanjutkan dengan adegan turun kejalan, menjarah, merusak dan mengepung rumah-rumah warga keturunan Tionghoa, sambil berteriak “Woy Cina!”.

Tahap Denotasi II:

Waktu: 08:03-08:06



“Bunuh, Bunuh!”

Warga berkerumun membawa bendera Negara Indonesia berteriak “Bunuh, Bunuh!” mengarahkan tangan kepada warga yang berciri fisik etnis Tionghoa (bermata sipit, berkulit putih, dan berambut lurus).

Tahap Denotasi III:

Waktu: 13:14



Fang Yin (Tokoh Utama Perempuan)

“Aku Kotor, Aku Kotor Albert”

Adegan ini menggambarkan keadaan Fang Yin dalam ruangan rumah sakit setelah menjadi korban pemerkosaan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal saat terjadinya kerusuhan 1998 yang menyasar warga Tionghoa.

Tahap Denotasi IV:

Waktu: 24:18-24:37

Fang Yin

“Itu bukan rumah aku kok,

KTP aku emang Indonesia tapi aku orang China”

“Kamu nggak dengar orang-orang itu bilang apa?”

“Bunuh China! Bakar China! Abisin China”

“Aku tuh Sipit”

Adegan ini diawali dengan pertemuan tokoh utama (Fang Yin) dengan psikiaternya disebuah café melalui ajakan tentang kepulangan sang psikiater terhadap Fang Yin ke negara Negara Indonesia.

Tahap Denotasi IV:

Waktu: 32:07-32:19

**Voice Over (VO)***“Apa Arti Indonesia?...”*

Adegan diawali dengan tokoh utama Fang Yin yang berdiri di depan peta besar dunia dan mulai mencoret wilayah Negara Indonesia dengan spidol hitam hingga menutupi seluruh wilayah Indonesia.

***Dilema Etnis Tionghoa di Indonesia,
analisis Film terhadap Diskriminasi
Minoritas***

Istilah “Cina” dalam pers Indonesia tahun 1950-an telah diganti menjadi menjadi “Tionghoa” (sesuai ucapannya dalam bahasa Hokkian) untuk merujuk pada orang Cina dan “Tiongkok” untuk negara Cina dalam pers Indonesia 1950 - an (Liem, 2000). Menurut Liem (2000) etnis Tionghoa di Indonesia yaitu orang Indonesia yang berasal dari negara Tiongkok dan sejak generasi pertama atau kedua telah tinggal di negara Indonesia, dan berbaur dengan penduduk setempat, serta menguasai satu atau lebih bahasa yang dipakai di Indonesia.

Sedangkan menurut Suryadinata (2009) istilah Tionghoa Indonesia digunakan merujuk pada etnis Tionghoa yang tinggal di negara Indonesia yang memiliki nama keluarga (marga), tanpa memandang kewarganegaraannya.

Pertumbuhan jumlah Tionghoa di Indonesia berkembang pesat, pada tahun 2006 dengan perkiraan jumlah populasi 10 juta, kelompok etnis Tionghoa Indonesia merupakan populasi Tionghoa terbesar di Asia Tenggara. Fakta statistik tersebut menunjukkan bahwa tidaklah tepat bila Tionghoa dilabel sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Tionghoa bahkan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia,

keturunan China atau biasa disebut Tionghoa juga sudah diakui menjadi etnis yang berada di wilayah Indonesia sehingga sama halnya dengan etnis Jawa, Sumatra dan lainnya.

Adanya penyebutan kata “Cina” terhadap warga keturunan yang sudah sah menjadi warga Negara Indonesia merupakan suatu bentuk kekerasan simbolik yang dapat berujung pada terjadinya diskriminasi. Kata “China” dalam nada keras seolah mendiskriminasi etnis tersebut karena dianggap tidak pantas berada dalam wilayah Indonesia. Sebagai etnis minoritas Tionghoa dianggap tidak pantas menyandingi etnis lain yang menjadi etnis mayoritas di Indonesia serta dianggap seperti bagian yang merusak sistem perekonomian Indonesia. Persoalan etnisitas ini sesuai merujuk pada konsep mayoritas dan minoritas yang di ungkapkan oleh Kinloch bahwa mayoritas merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan, menganggap dirinya normal dan memiliki derajat lebih tinggi. Sedangkan kelompok lain yang dianggap sebagai kelompok minoritas adalah mereka yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap lebih rendah karena memiliki ciri tertentu: cacat secara fisik ataupun mental sehingga mereka mengalami eksploitasi dan diskriminasi (Kinloch, 1979: 38).

Film sapu tangan Fang Yin, menggambarkan bagaimana etnis cina mengalami diskriminasi yang jauh lebih dalam ketika sang tokoh utama adalah seorang perempuan. Diskriminasi ini muncul sebagai akibat dari adanya proses kekerasan simbolik yang terjadi secara terus menerus. Proses diskriminasi pada perempuan dalam etnis minoritas tidaklah berhenti pada proses itu saja. Mereka dianggap paling rentan dan paling mudah dijadikan sasaran kekerasan massa. Mereka jauh lebih menjadi korban kekerasan pada tingkatan yang lebih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki diposisi yang sama.

Dalam film ini tergambar tokoh utama menjadi korban pemerkosaan, dan dirinya merasa telah “kotor”. Kata “kotor” merupakan stereotipe perempuan korban pemerkosaan yang telah menjadi pandangan hidup dimasyarakat. Kata kotor disematkan kepada perempuan dengan maksud seolah-olah sebagai korban pemerkosaan perempuan tidak lagi memiliki nilai tawar lebih atau tidak berharga di masyarakat. Perempuan kotor sama dengan analogi kotor yang ada pada sampah (barang yang tidak terpakai). Stereotipe ini pada dasarnya mendiskriminasi perempuan pada dua level tingkatan. Selain sebagai perempuan dan korban kejahatan, mereka juga menjadi korban diskriminasi disaat yang sama.

Pristiwa kerusuhan dan pemerkosaan mei 1998 menjadi contoh diskriminasi perempuan yang jauh lebih tinggi lagi. Perempuan Tionghoa yang diperkosa menerima bertubi-tubi diskriminasi pada “tiga level tingkatan” (*triple discrimination*) karena sebagai perempuan dia terdiskriminasi (dianggap lemah, tidak berdaya, dan tidak berguna), dilain pihak dia juga menjadi korban kejahatan dan dalam konteks etnis (Tionghoa) pun dia terdiskriminasi.

Kerusuhan dan pemerkosaan seolah menjadi dua hal yang begitu menghantui Negara Indonesia pasca runtuhnya rezim Suharto. Tidak lama setelah pengumuman pengunduran diri Presiden Suharto rakyat berpesta pora, menumpahkan rasa terpendam dalam diri yang tertahan sekian lama dengan hal-hal yang mengarah kepada anarkisme. Bahkan akhirnya pun menysasar etnis minoritas Tionghoa. Secara historis dan klasik menurut Julia Suryakusuma (2012) rasisme merupakan saluran mudah melampiaskan penyakit sosial, sedangkan seksisme merupakan kembarannya yang buruk dan menyeramkan. Perempuan di kosntruksikan secara sosial, budaya dan ideologis sebagai lemah, dan lebih rendah. Warga Tionghoa dijadikan sasaran karena diidentifikasi telah menerima hak istimewa ekonomi pada masa Orde Baru. Rakyat tidak mungkin menyalurkan frustrasi

terhadap elite penguasa yang bertanggung jawab menggunakan kekerasan, sehingga hal yang mungkin adalah jadilah perempuan etnis Tionghoa sebagai sasaran logis (Suryakusuma, 2012: 233).

Pada bagian lain Film sapu tangan Fang Yin ada pengungkapan kata “Sipit”, yang dalam adegan tersebut yang mengindikasikan kekerasan simbolik atas labelisi etnisitas. Kata “sipit” merujuk pada tampilan fisik orang China yang identik bermata sipit dan secara kultural berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan. Kata ini merupakan kekerasan simbolik atas dominasi etnis lain.

Kekerasan simbolik menurut Bourdieu itu dilembagakan lewat perantara kesepakatan yang biasa diberikan oleh si terdominasi terhadap dominan, secara natural tanpa disadari oleh kaum yang terdominasi (Bourdieu, 2010: 50). Adanya pembedaan ini yang mengarah pada kekerasan simbolik ini mengandung makna terselubung bahwa pada dasarnya terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka merupakan sang “Liyen”. Liyen menampilkan realitas keterbelengguan, bahwa dirinya bukan miliknya, tubuhnya bukan kepunyaannya, hidupnya pun bukan berada dalam kekuasaannya (Riyanto, 2011: 37). Mereka terpinggirkan terdiskriminasi dan tak dianggap. Mereka bukan menjadi salah satu suku atau bagian dari bangsa

Indonesia. Mereka bukan pribumi. Pribumi diartikan sebagai kelompok yang memiliki daerah mereka sendiri (Suryadinata, 2010: 2). Hal ini dilegitimasi oleh negara melalui pemerintah. Etnis ini menjadi korban percobaan dalam berbagai kebijakan pemerintah sejak pemerintahan kolonial hingga orde baru.

Puncaknya dimasa Orde baru etnis ini dibungkam dan diperdaya. Dibungkam melalui dibuatnya aturan – aturan mengenai larangan kebudayaan Tionghoa di Indonesia, dan diperdaya melalui menjadikan etnis ini

Simpulan

Menempuh jalan panjang dan penuh dengan kekelaman untuk diakui sebagai sebuah etnis yang disejajarkan dengan etnis lain di Indonesia merupakan kenyataan yang harus dialami etnis Tionghoa. Ciri masyarakat sipil yang berkeberadaban dan berkedamaian dirusak melalui konstruksi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah era Orde baru pada etnis ini. Film Sapu Tangan Fang Yin memberikan sedikit gambaran bagaimana kekerasan simbolik yang berujung pada diskriminasi dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada etnis Tionghoa berakibat pada keterpurukan mental dan keterpinggiran keberadaan Etnis ini di Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan sang “Liyan”. Liyan

yang sukses dibidang ekonomi sebagai “*sapi perah*” bagi kekuasaan Orde Baru. Ungkapan “Negaraku tetapi bukan Negaraku” seolah membenarkan kenyataan yang terjadi terhadap Etnis ini. Julia Suryakusuma (2012) mengungkapkan dimasa orde baru pemerintah mengkonstruksi dan memberikan label stereotipe terhadap etnis Tionghoa sebagai etnis yang rakus, materialistis, dan menjadi sasaran “politik pengucilan” (Suryakusuma, 2012: 234).

menampilkan realitas keterbelengguan, bahwa dirinya bukan miliknya, tubuhnya bukan kepunyaannya, hidupnya pun bukan berada dalam kekuasaannya. Melalui peristiwa kerusuhan dan pemerkosaan pada “Tragedi Mei 1998”.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, Pierre. (2010). *Domansi Maskulin (Pent. Stephanus Aswar Herwinarko)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chris, Barker (2013). *Cultural Studies: Teori dan Praktik (Pent. Nurhadi)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Denny J.A (2013). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Greif, Stuart. W. (1991). *WNI; Problematik Orang Indoensia Asal Cina*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Monaco, James (2000). *How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond*. NewYork : Oxford Press Inc.
- Riyanto, Armada. (2011). *Aku dan Liyan, Kata Filsafat dan Sayap*. Malang : Widya Sasana Publication.
- Sobur, Alex (2009). *Psikologi Umum* . Bandung : Pustaka Setia.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Suryadinata, Leo (2010). *Etnis Tionghoa dan nasionalisme Indonesia: sebuah bunga rampai, 1965-2008*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suryakusuma, Julia. (2012). *Agama, Seks, Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Centre for the Study of the Chinese Southern Diaspora (CSCSD), *Workshop Chinese Indonesians: The Way Ahead*, Coombs Lecture Theatre, RSPAs, ANU. 15-16 February 1999
- Danandjaja, James. (2003). *Diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia. 19 Mei 2003.
- Huda, Samsul. (2010). *Orang Indonesia Tionghoa dan Persoalan Identitas*. Kontekstualita, Vol. 25, No. 1, 2010
- Juliastutik. (2010). *Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*. HUMANITY. Volume 6, Nomor 1, September 2010: 45 – 58.
- Leo Suryadinata, “Liem Koen Hian Peranakan yang Mencari Identitas”, Prisma 3 (1983), hal. 71-85.
- Tempo. *Setelah Enam Belas Abad*. Edisi Hari Kemerdekaan, 17th Aug 2004; hal 36-37. Indonesia.